

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali, 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aloysius Soni BL de Rosari (ed), 2011, *“Monarki Yogya” Inkonstitusional*, Kompas, Jakarta.
- Anonim, 2013, *Buku Panduan Magister Ilmu Hukum Tahun Akademik 2013/2014*, Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014-2019*, Sekretariat DPRD DIY, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baskoro, Haryadi & Sudomo Sunaryo, 2011, *Wasiat HB IX, Yogyakarta Kota Republik*, Galangpress, Yogyakarta
- Djojosoekarto, Agung *et all*, 2006, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Yayasan Konrad Adenauer & Adeksi, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Pusat Kajian Hukum dan Kemitraan Daerah (PKHKD) FH UNSOED dengan UII Press, Yogyakarta.
- Jamali, Abdoel, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2008, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, LAN, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Aparatur Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, Nusamedia, Bandung.
- _____, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusamedia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universtias Atma Jaya, Yogyakarta.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nur Wijayanti, Septi & Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara dalam Teori dan Praktik*, Laboratorium Ilmu Hukum UMY, Yogyakarta.
- Poerwokoesomo Soedarisman, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipro, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Ramadani, Rizki, Wafia SD Rini & Nabila D Putri, 2015 (ed), *Hukum dalam Bunga Rampai Pemikiran*, Genta Press, Yogyakarta.
- Rozaki, Abdur, dkk, *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*, IRE Press, Yogyakarta.
- Salindeho, John, 1994, *Pengawasan Melekat, Aspek-aspek Terkait dan Implementasinya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sirajuddin *et. all.*, 2009, *Parlemen Lokal DPRD, Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia, Jakarta.
- _____, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman & Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 1998, *Manajemen Pemerintahan*, PT Pertja, Jakarta.
- Tarmidji, Zaini, 1992, *Fungsi Kontrol DPRD dalam Pemerintah Daerah*, Angkasa, Bandung.
- Tim Penyusun, 2012, *Pedoman Umum EYD dan Dasar Umum Pembentukan Istilah*, Diva Press, Yogyakarta.
- Tutuk, Titik Triwulan & Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R Tjandra, Willy, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.
- Wiratno, 2013, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen-amandemennya.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 48).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 827).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5568).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5650).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 931).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 972).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1680).
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9).

- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 58).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 18).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 37).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 115).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34).
- Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88).
- Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39).
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.
- Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K.P/DPRD/2016 Tentang Konsultasi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/2016 Tentang Susunan Personalia Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Didanai dengan Dana Keistimewaan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K.P/DPRD/2016 Tentang Kunjungan Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/K.P/DPRD/2016 Tentang Perpanjangan Waktu Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/2016 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/2017 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2017.

Jurnal

Budiyono, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1 Januari-April 2013,

Huda, Ni'matul, 'Masa Depan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Yuridis', *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, September 2007.

Irsan, Meria Utama, Iza Rumesten RS, 'Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah', *Jurnal Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Volume XX nomor 50, Januari 2013.

Juharni & Umar, 'Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai', *Jurnal Ad'ministrative*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2016.

Kamilah, Mutia, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 di Kota Balikpapan, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, volume (2) 1, Tahun 2014.

Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin dan Eko Priyo Purnomo, 'Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

- Tahun 2013-2017' *Jurnal Agregasi*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2018.
- Praptomo, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2016.
- Pratama, Dian Putri, Retno Saraswati & Suparno, 'Kajian Tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta', *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2013.
- Tanjung, Laksmi Nurita, Dyah Mutiarin & Eko Priyo Purnomo, "Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Agregasi*, volume 6/Nomor1/Tahun 2018.
- Thontowi, Jawahir, 'Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kesejahteraan Rakyat', *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, September 2007.
- Wuryaningsih, Astuti, 'Eksistensi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, Edisi 4, Mei 1998, Tahun V.

Surat Kabar

- Falaakh, M Fajrul, "Monarki Yogya" Inkonstitusional, *Kompas*, 1 Desember 2010.
- Soerapto, Sarwoto, Menagih Transparansi Dana Keistimewaan, *Kedaulatan Rakyat*, 15 April 2017.
- Subagyo, P Ari, Yogyakarta Paripurna, *Kedaulatan Rakyat*, 21 Januari 2017.
- Sumantri, Bambang Sigap & Haris Firdaus, Dana Pertaruhan Politik & Budaya, *Kompas*, 27 Mei 2015.
- Suranto, Danais untuk Siapa?, *Kedaulatan Rakyat*, 15 September 2017.
- Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, 31 Januari 2018.

Kamus

- Penyusun, Tim, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Penelitian, Skripsi, Tesis

- Alfian, Alfian, 2015, *Diskresi dalam Penggunaan Dana Keistimewaan*, Hibah Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Darmadi, Budi, 2014, *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mewujudkan Prinsip Check and Balances (Studi Kasus DPRD Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali)*, Tesis, Magister Hukum Universtias Gadjah Mada.
- Oyan, James, 2016, *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Samratulangi.
- Sejati, Herlambang Fadlan, 2016, *Kebijakan Mengenai Ketidakpastian Besaran Prosentase Dana Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
- Setiadi, Reza Rahardian, 2015, *Peranan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Melaksanakan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sumaji, 2007, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Wawancara

Wawancara dengan Arif Noor Hartanto, S. I. P., (Mas Inung), selaku Wakil Ketua DPRD DIY dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Wawancara dengan Eko Suwanto, S.T., M.Sc., selaku Ketua Komisi A bidang pemerintahan DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Wawancara dengan Anggota DPRD DIY, Suparja, S. I. P., selaku Sekretaris Komisi B bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD DIY dari Fraksi Kebangkitan Nasional.

Wawancara dengan Sudaryanto, S.H., selaku anggota Komisi C bidang Pembangunan DPRD DIY dari Fraksi Kebangkitan Nasional.

Wawancara dengan Koeswanto, S.I.P. selaku anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Wawancara dengan Imam Sujangi sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DIY.

Wawancara dengan Istianah ZA, S.H., M.Hum, sebagai Tenaga Ahli Komisi D DPRD DIY.

Internet

<http://jogja.pks.id/2014/08/kewenangan-dprd-dilemahkan-dana.html>, diakses pada tanggal 12 April 2018 Pukul 19.30 WIB.

www.dprd-diy.go.id.

<http://www.harianjogja.com/baca/2017/01/25/keistimewaan-diy-muncul-wacana-perda-pengelolaan-danais-787628>.

<https://www.radarjogja.co.id/gubernur-tolak-rekomendasi-pansus-pengawasan-uu-k>.